

Pengaruh Budaya Organisasi Berbasis Kepasundanan Terhadap Kinerja Keuangan Museum Sri Baduga

Roro Janri Rahmala¹, Nais Tuti Nurdini², Erika Sufianty³, Elfa Juliyanti⁴, Dea Amelia⁵, Nadya Rachmawati Putri⁶

Universitas Pasundan, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: rorojanrir@gmail.com, naisastuti257@gmail.com, elfajuliyanti6@gmail.com, erikasufianty06@gmail.com, dheyaamelia26@gmail.com, nadyarachmawati310@gmail.com

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 27 Mei 2026, Article published: 29 Juni 2026

ABSTRACT

A strong organizational culture, shaped by effective leadership, can be a key driver in improving an institution's performance. This study aims to examine the application of Sundanese cultural values at the Sri Baduga Museum and to analyze their impact on the institution's financial performance. This study employs a descriptive qualitative approach using a literature review method. Data collection techniques were conducted through interviews, direct observation, and literature review. The results of the study indicate that the Sundanese cultural values implemented through discipline, responsibility, hospitality, and the preservation of Sundanese culture are capable of supporting improved employee discipline, the quality of public services, transparency in financial management, and strengthening the museum's positive image in the community. Thus, the integration of local cultural values into the bureaucratic organizational system not only strengthens the institution's identity but has also proven effective in improving operational efficiency and financial accountability within public agencies.

Keywords: *Organizational Culture, Sundanese Culture, Financial Performance, Local Wisdom, Sri Baduga Museum, Public Management.*

ABSTRAK

Budaya organisasi yang kuat, dibentuk oleh kepemimpinan yang efektif, dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kinerja instansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai budaya kepasundanan di Museum Sri Baduga serta menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja keuangan instansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kepasundanan yang diterapkan melalui nilai disiplin, tanggung jawab, keramahan, dan pelestarian budaya Sunda mampu mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai, kualitas pelayanan publik, transparansi pengelolaan keuangan, serta memperkuat citra positif museum di masyarakat. Dengan demikian, integrasi nilai budaya lokal ke dalam sistem organisasi birokrasi tidak hanya memperkuat identitas lembaga, tetapi juga terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas keuangan instansi publik.

Kata Kunci: *Budaya Organisasi, Kepasundanan, Kinerja Keuangan, Kearifan Lokal, Museum Sri Baduga, Manajemen Publik.*

PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi dalam ranah publik memaksa instansi pemerintah untuk senantiasa meningkatkan performa, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang harus berjalan dengan cara yang efektif, efisien, serta bertanggung jawab. Dalam usaha ini, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya bergantung pada penerapan sistem dan prosedur yang resmi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti perilaku individu dan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, selain strategi teknis dalam manajemen, budaya organisasi dapat dianggap sebagai salah satu elemen yang dapat memperkuat pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Museum Sri Baduga, sebagai lembaga publik yang berfokus pada pelestarian budaya lokal, memiliki posisi yang unik dan strategis dalam jaringan organisasi pemerintah. Beroperasi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), museum yang dinamai menurut gelar Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja) ini memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan publik dan menjaga sejarah Tatar Sunda. Untuk memastikan kelestarian warisan budaya di masyarakat, museum secara rutin menyelenggarakan layanan publik berupa pertunjukan seni dan edukasi budaya tanpa biaya bagi pengunjung, yang mayoritas terdiri dari pelajar dan mahasiswa.

Namun, dibalik perannya dalam memberikan layanan publik dan pelestarian budaya, Museum Sri Baduga juga diharuskan untuk menunjukkan akuntabilitas yang kuat dalam kinerja keuangan sesuai dengan peraturan birokrasi yang ada. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat tentang retribusi, seluruh pendapatan dari kegiatan museum harus disetorkan secara teratur ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tanpa adanya pembagian hasil, sehingga semua pendapatan sepenuhnya masuk ke kas daerah. Seluruh pengelolaan keuangan ini dicatat di sekretariat UPTD dan mengikuti ketentuan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD). Dengan sistem anggaran yang berbasis Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan setahun sebelumnya, pengelola museum menghadapi tantangan karena adanya kriteria penggunaan anggaran yang sangat ketat, di mana alokasi terbesar terfokus pada biaya operasional kelistrikan dan pemeliharaan gedung yang tidak dapat dialokasikan untuk keperluan lain.

Selain itu, sebagai lembaga yang mencerminkan identitas budaya Sunda, nilai-nilai kearifan lokal Kepasundanan seperti Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan singer seharusnya hidup dan tercermin dalam perilaku kerja para pegawainya. Kelima nilai Kepasundanan tersebut memiliki implementasi nyata dalam keseharian operasional Museum Sri Baduga. Nilai Cageur (sehat jasmani dan rohani) diterapkan melalui budaya kerja yang sehat, seperti kehadiran tepat waktu, menjaga kondisi fisik dalam melayani pengunjung, serta menciptakan suasana kerja yang bebas dari konflik internal. Nilai Bageur (baik hati dan bertanggung jawab) tercermin dalam perilaku staf yang kooperatif, seperti kesediaan pegawai administrasi membantu antar divisi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tanpa perlu diminta. Nilai Bener (jujur dan lurus) diwujudkan secara konkret dalam komitmen pegawai untuk selalu menyertakan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dalam setiap transaksi anggaran, meskipun

nilainya kecil, sebagai bentuk integritas terhadap sistem akuntabilitas publik. Nilai Pinter (cerdas dan terampil) tampak pada kemampuan kurator dan edukator museum dalam merancang program edukasi budaya yang kreatif dan informatif sesuai kebutuhan berbagai kalangan pengunjung, mulai dari pelajar hingga wisatawan umum. Sementara itu, nilai Singer (teliti dan cermat) diimplementasikan dalam ketelitian staf dalam mencatat dan menginventarisir ribuan koleksi benda bersejarah museum, memastikan tidak ada aset yang luput dari pengawasan demi menjaga akuntabilitas aset daerah.

Dalam pengelolaan keuangan UPTD yang kaku dan dibatasi oleh regulasi seperti larangan untuk menerima kerjasama komersial dalam bentuk uang (hanya diperbolehkan dalam bentuk jasa, mitra akademis, atau tempat magang/penelitian) serta kewajiban untuk menyertakan bukti formal dalam setiap pengeluaran nilai Bener (integritas/kejujuran) dan Bageur (tanggung jawab/kerja sama) menjadi elemen internal yang penting. Meskipun nilai-nilai budaya ini tidak langsung mempengaruhi angka dalam laporan keuangan, mereka mempengaruhi cara individu atau staf menjalankan kepatuhan terhadap peraturan anggaran pemerintah dan merawat ribuan koleksi sejarah secara berkelanjutan.

Hingga saat ini, penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara budaya organisasi berbasis kearifan lokal dan kinerja keuangan, khususnya pada lembaga publik yang berstatus UPTD dan memiliki sistem pendapatan sepenuhnya diserahkan ke kas daerah, masih cukup langka dan lebih bersifat teoritis. Oleh karena itu, diperlukan studi empiris yang dapat menguji hubungan ini secara kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih nyata. Berdasarkan uraian itu, fokus penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu mengenai implementasi budaya organisasi berbasis nilai-nilai Kepasundanan di kalangan aparatur Museum Sri Baduga, bagaimana kinerja pengelolaan keuangan museum sebagai instansi UPTD, dan apakah budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Kepasundanan mempengaruhi secara signifikan pencapaian kinerja keuangannya.

Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan budaya organisasi yang berakar pada nilai-nilai Kepasundanan, menggambarkan sistem dan performa pengelolaan keuangan di Museum Sri Baduga sebagai UPTD, serta menganalisis sejauh mana nilai-nilai budaya lokal tersebut berkontribusi sebagai salah satu elemen yang mempengaruhi kinerja keuangan organisasi.

Dari perspektif teori, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan serta menambah kajian empiris mengenai hubungan antara budaya organisasi berbasis kearifan lokal dan manajemen keuangan dalam sektor publik, sekaligus menjadi referensi untuk penelitian lanjutan yang membahas topik akuntansi budaya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai alat evaluasi internal bagi pengelola Museum Sri Baduga untuk memahami dampak nilai budaya kerja terhadap efisiensi dan transparansi anggaran, serta sebagai referensi dan perbandingan bagi instansi budaya atau UPTD lainnya dalam menyelaraskan pelestarian nilai tradisi dengan tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan di pemerintah daerah.

Budaya Organisasi dalam Instansi Pemerintah, Budaya organisasi adalah cara berpikir, keyakinan, aturan, dan sikap yang dibawa oleh semua orang dalam organisasi tersebut, serta menjadi acuan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Menurut Schein, budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang dibuat oleh suatu kelompok untuk menghadapi masalah dari luar dan mempersatukan anggota dalam organisasi, kemudian diajarkan kepada orang baru sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, dan bertindak di dalam organisasi. Budaya organisasi membantu memperkuat komitmen, meningkatkan kerja sama antar anggota, menciptakan lingkungan kerja yang stabil, serta membentuk identitas organisasi agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif.

Dalam lembaga pemerintahan, budaya kerja fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan menerapkan prinsip tanggung jawab, kejujuran, serta keterampilan profesional sebagai bagian dari pemerintahan yang baik. Organisasi di sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai layanan publik, serta mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan.

Menurut Schein (dalam Lase et al., 2025), menyebutkan bahwa budaya organisasi terbagi menjadi tiga tingkat. Pertama adalah artefak, yang mencakup hal-hal yang terlihat dan nyata, seperti cara mengatur ruangan, bahasa yang digunakan, serta ritual-ritual dalam organisasi. Kedua adalah nilai-nilai yang dianut, seperti visi, misi, dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh organisasi tersebut. Ketiga adalah asumsi dasar, yaitu keyakinan yang tidak disadari oleh anggota organisasi, tetapi mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku mereka.

Budaya organisasi yang baik dapat membuat karyawan lebih merasa terhubung dan memiliki ikatan yang kuat terhadap organisasi tersebut. Puspita dan Sembiring (sebagaimana dikutip oleh Febriani et al., 2023) menyatakan bahwa budaya organisasi memberikan dampak positif terhadap tingkat keterikatan karyawan. Denison dan Mishra (dikutip dalam Febriani et al., 2023) juga menyatakan bahwa budaya yang kuat dapat meningkatkan rasa keterikatan karyawan. Sementara itu, Robbins dan Timothy (dikutip dalam Febriani et al., 2023) menjelaskan bahwa semakin kuat budaya organisasi, semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku anggota organisasi, sehingga meningkatkan rasa loyalitas dan komitmen mereka terhadap organisasi.

Dalam organisasi pemerintah, cara kerja dan nilai-nilai yang dianut oleh anggota organisasi juga mempengaruhi tingkat kualitas layanan yang diberikan. Menurut Hayat (dalam Dewi et al., 2021), pelayanan publik adalah penanda penting dari kinerja organisasi publik, sehingga perlu didukung oleh manajemen yang fokus pada kualitas pelayanan. Selain itu, Suwarno (dalam Dewi et al., 2021) mengatakan bahwa inovasi di sektor publik adalah salah satu cara untuk mengatasi berbagai hambatan dalam organisasi, dengan melakukan pembaruan atau menciptakan layanan yang lebih efektif dan lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat.

Budaya Kepasundanan sebagai Identitas Pelayanan Publik, Konsep Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh adalah nilai penting dari budaya Sunda yang digunakan sebagai pedoman dalam berinteraksi dan menjaga hubungan sosial di masyarakat. Nilai ini menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang, belajar

bersama, dan saling menopang dalam hidup berkelompok. Dari sudut pandang etnopedagogi, konsep ini bukan hanya berupa aturan yang berlaku di masyarakat, tetapi juga menjadi dasar pembentukan karakter yang sesuai dengan tantangan di era modern. Penelitian yang dilakukan oleh Huzaeema dkk. pada tahun 2024 menjelaskan bahwa Silih Asih, Silih Asuh, dan Silih Asah adalah budaya tradisional masyarakat Sunda yang berperan dalam membentuk karakter seseorang melalui proses belajar sosial serta pengembangan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai itu menjadi alat penting untuk menjaga identitas budaya dan memperkuat rasa persatuan masyarakat.

Selanjutnya, Maulana dkk. (2025) menekankan bahwa konsep Silih Asah, Asih, Asuh bisa digunakan dalam pembelajaran untuk membentuk kepribadian siswa yang bekerja sama, peka terhadap orang lain, dan memiliki rasa tanggung jawab. Nilai silih asah mendorong orang untuk saling belajar dan berbagi ilmu, silih asih mendorong perasaan peduli terhadap orang lain, dan silih asuh mendorong sikap membimbing dan melindungi satu sama lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk. pada tahun 2025 menunjukkan bahwa filosofi Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh dapat dijadikan kerangka konseptual dalam pendidikan yang berdasarkan pada budaya lokal Sunda. Tiga nilai tersebut dianggap bisa membentuk hubungan yang baik antara seseorang dan kelompok masyarakat melalui cara saling belajar, saling mencintai, dan saling menjaga.

Kajian yang dilakukan oleh Rezqi dan Furqan pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa nilai Trisilas selaras dengan nilai-nilai moral yang terdapat dalam Al-Qur'an. Konsep itu mendorong masyarakat untuk bertindak dengan penuh kasih sayang, bekerja sama, bertanggung jawab, dan menghormati setiap orang lain. Dengan demikian, Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh bisa dianggap sebagai contoh dari kearifan lokal yang membantu membentuk karakter masyarakat yang lebih berperikemanusiaan dan beragama.

Nilai-nilai seperti Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer adalah etos budaya Sunda yang menunjukkan gambaran karakter yang diidamkan oleh orang Sunda. Kelima nilai itu merupakan bagian dari filosofi Gapura Panca Waluya yang bertujuan membentuk manusia yang sehat, baik, benar, cerdas, dan mampu dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Penelitian Aprily dkk. tahun 2021 menunjukkan bahwa filosofi tersebut sangat relevan dalam membentuk karakter anak-anak usia dini. Nilai cageur menunjukkan kondisi tubuh dan pikiran yang baik, bageur berkaitan dengan cara berperilaku yang baik dan sopan, bener berarti bersikap jujur dan memiliki integritas, pinter melambangkan kecerdasan, sedangkan singer menunjukkan kemampuan untuk mengenali dan menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sosial.

Utami (2021) menyatakan bahwa filosofi Cageur, Bageur, Bener, Pinter, serta turut Singer berperan besar dalam memperkuat karakter siswa. Nilai-nilai itu bisa menjadi dasar pembentukan diri seseorang yang tidak hanya berprestasi baik di bidang akademik, tetapi juga memiliki perilaku yang baik dan peduli terhadap masyarakat.

Penelitian Purnama dan Hermanto tahun 2024 menunjukkan bahwa budaya Sunda seperti Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer masih relevan meskipun ada perubahan sosial dan proses modernisasi. Filosofi ini dianggap sebagai pedoman dalam hidup masyarakat Sunda untuk membentuk seseorang yang seimbang di antara kecerdasan berpikir, nilai moral, hubungan sosial, dan aspek spiritual.

Kajian yang dilakukan oleh Putri dkk. pada tahun 2024 tentang Tari Topeng Koncaran menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer, dan Wanter terwujud dalam gerakan tubuh, ekspresi wajah, serta simbol budaya Sunda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Sunda tidak hanya ada dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga diwariskan melalui seni tradisional sebagai cara untuk membentuk karakter dan melestarikan budaya.

Tri Tangtu di Bumi adalah salah satu gagasan penting dalam ilmu kosmologi dan cara berpikir hidup masyarakat Sunda. Konsep ini menjelaskan prinsip keseimbangan yang mendasari cara memahami hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan yang di luar dunia nyata. Dalam naskah bahasa Sunda kuno "Sanghyang Siksa Kandang Karesian", ketiga aspek Tri Tangtu yang ada di dunia ini diwujudkan melalui tiga unsur utama, yaitu Prabu, Rama, dan Resi. Prabu bertugas sebagai orang yang mengurus pemerintahan, Rama bertugas menjaga adat istiadat dan kehidupan masyarakat, serta Resi bertugas menjaga nilai-nilai spiritual dan ilmu pengetahuan. Ketiga hal tersebut saling melengkapi dan membentuk kehidupan yang seimbang dan harmonis.

Dalam pandangan kosmologi Sunda, konsep Tri Tangtu tidak hanya berkaitan dengan struktur masyarakat, tetapi juga dengan cara memahami ruang. Ruang dianggap sebagai bagian dari susunan alam semesta yang terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu Buana Nyuncung, Buana Panca Tengah, dan Buana Larang. Buana Nyuncung adalah langit atas yang dianggap sebagai daerah suci dan tempat bersemayamnya kekuatan keagamaan. Buana Panca Tengah adalah tempat tengah yang menjadi ruang untuk hidup manusia. Sementara itu, Buana Larang adalah dunia bawah yang terkait dengan hal-hal material dan dunia yang biasa. Pembagian itu menunjukkan bahwa ruang dalam pandangan masyarakat Sunda tidak hanya memiliki bentuk fisik, tetapi juga memiliki makna simbolik dan spiritual.

Konsep ruang dalam Tri Tangtu di Bumi juga terlihat dalam cara masyarakat Sunda mengatur tata ruang tradisional mereka. Pembagian wilayah menjadi tempat suci, tempat tinggal, dan tempat produksi menunjukkan usaha untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan alam. Hutan larangan, misalnya, dianggap sebagai tempat suci yang perlu dijaga karena berperan penting dalam fungsi ekologis dan juga memiliki makna spiritual. Pandangan ini mengatakan bahwa alam bukanlah benda yang bisa diminati secara semena-mena, melainkan bagian dari kehidupan yang patut dihormati dan dirawat.

Dari sudut pandang spiritual, Tri Tangtu di Bumi menekankan pentingnya mempertahankan hubungan yang seimbang antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan orang lain, dan manusia dengan lingkungan alam. Spiritualitas dalam budaya Sunda diwujudkan dengan cara hidup yang mengutamakan keseimbangan, keselarasan, serta menghormati semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, konsep ini bukan hanya menjadi panduan dalam berperilaku secara baik,

tetapi juga menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan sosial dan lingkungan yang bisa bertahan lama.

Dengan demikian, Tri Tangtu di Bumi bisa diartikan sebagai sebuah konsep yang menggabungkan aspek ruang dan spiritualitas dalam satu kesatuan yang utuh. Konsep ini menjelaskan bahwa keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi merupakan dasar utama dalam cara hidup masyarakat Sunda. Selain memiliki nilai budaya yang tinggi, konsep tersebut juga penting dalam studi lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan saat ini.

Hubungan antara manusia dan alam adalah hal yang sangat penting dalam hidup masyarakat tradisional. Alam tidak hanya dianggap sebagai tempat yang memberikan kebutuhan untuk hidup, tetapi juga sebagai ruang dimana kehidupan terjadi, yang memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual. Dalam pandangan ini, manusia dan alam saling tergantung satu sama lain, sehingga kehidupan manusia bisa berjalan lancar tergantung pada kondisi lingkungan di sekitarnya.

Orang-orang menggunakan alam untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pekerjaan. Namun, penggunaan tersebut harus dilakukan dengan bijak agar tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam mendorong munculnya berbagai nilai dan cara kerja yang menjaga lingkungan hidup, misalnya dengan menjaga kehutanan, melindungi sumber air, serta menggunakan bahan alam sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Di banyak kelompok masyarakat adat, alam tidak hanya dianggap sebagai sumber kekayaan ekonomi, tetapi juga memiliki arti yang lebih dalam. Alam dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang perlu dihormati dan dilindungi. Pandangan ini mendorong munculnya aturan, norma, dan kearifan lokal yang mengatur cara manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Melalui aturan itu, masyarakat berusaha menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dan usaha melestarikannya.

Dari sudut pandang alam, hubungan baik antara manusia dan lingkungan sangat penting agar kehidupan bisa terus berlangsung. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran, penebangan hutan yang berlebihan, dan penggunaan sumber daya yang tidak terkendali bisa menyebabkan banyak masalah, termasuk penurunan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua harus sadar dan bertanggung jawab bersama-sama untuk menjaga lingkungan tetap terjaga.

Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan alam adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Manusia memerlukan alam untuk hidup, sedangkan alam membutuhkan cara mengelolanya dengan bijak agar tetap hidup dan tidak rusak. Hubungan yang baik antara keduanya merupakan dasar yang penting untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dan seimbang.

Kinerja Keuangan pada Instansi Publik, Pemerintah sektor publik memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang optimal. Kepercayaan masyarakat terhadap sektor publik menjadi dasar legitimasi operasional pemerintah, sehingga penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu keharusan (Utami, 2023). Bukan untuk menghasilkan keuntungan, akuntansi sektor publik digunakan

untuk mengukur dan melaporkan kinerja pemerintah. Bukan untuk menghasilkan keuntungan, akuntansi sektor publik digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah memenuhi kewajibannya terhadap program-program yang telah direncanakan (Moediono, 2022). Sarana utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik adalah laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pada organisasi sektor publik secara baik sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengungkapkan informasi dan kegiatan pemerintahan kepada masyarakat (Saraswati & Suhartini, 2022).

Konsep kinerja keuangan sektor publik tersebut dapat dilihat dalam pengelolaan keuangan di Museum Sri Baduga sebagai instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Hasil wawancara menunjukkan bahwa museum dikelola oleh pemerintah daerah, dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara langsung membayar tiket masuk dan penyewaan fasilitas auditorium. Selain itu, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang disusun dengan baik dan memiliki bukti yang menunjukkan bagaimana dana digunakan. Sistem ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan museum mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran sebagai bagian dari sistem sektor publik.

Namun demikian, di balik nilai-nilai positif transparansi dan akuntabilitas tersebut, sistem keuangan terpusat yang diterapkan pada instansi UPTD seperti Museum Sri Baduga juga mengandung dimensi keterbatasan yang perlu diakui secara kritis. Sistem di mana seluruh penerimaan diserahkan ke kas daerah dan pengeluaran hanya dapat dilakukan berdasarkan anggaran yang telah disetujui jauh sebelumnya berpotensi menghambat respons cepat museum terhadap kebutuhan operasional yang bersifat mendesak atau tidak terprediksi. Abdurahman (2021) menyebutkan bahwa kekakuan anggaran pada satuan kerja pemerintah daerah seringkali menjadi faktor penghambat inovasi pelayanan publik, karena unit pelaksana tidak dapat menggunakan pendapatan yang mereka hasilkan sendiri untuk meningkatkan kualitas layanannya secara langsung. Oleh karena itu, kinerja keuangan suatu UPTD tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan teknis pelaporan, melainkan juga oleh sejauh mana pegawai mampu bekerja secara optimal dalam bingkai sistem yang membatasi ruang gerak mereka, dan disinilah nilai-nilai budaya organisasi seperti Kepasundanan memainkan peran yang krusial.

Sistem Keuangan Daerah dan Keterbatasan Otonomi UPTD, Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan bagaimana sumber daya publik direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui sistem keuangan daerah, pemerintah mengatur seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua unit kerja pemerintah memiliki kewenangan yang sama dalam mengelola keuangan. Salah satu unit yang memiliki ruang gerak terbatas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sebagai unit pelaksana yang berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UPTD bertugas menjalankan fungsi operasional dan pelayanan kepada masyarakat, namun kewenangan dalam pengambilan keputusan keuangan tetap berada pada instansi induknya. Dengan demikian, berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan UPTD harus mengacu pada perencanaan serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD tidak sepenuhnya bersifat mandiri. Meskipun sistem ini bertujuan menjaga pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran, pada praktiknya terdapat keterbatasan yang dapat mempengaruhi fleksibilitas organisasi dalam menjalankan tugasnya. Ketika muncul kebutuhan yang bersifat mendesak atau peluang untuk melakukan pengembangan layanan, UPTD sering kali harus menyesuaikan diri dengan mekanisme birokrasi dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akibatnya, kemampuan organisasi untuk merespons perubahan secara cepat menjadi relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut juga terlihat dalam pengelolaan pendapatan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Pada umumnya, seluruh penerimaan yang diperoleh dari pelayanan publik harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah dan tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh unit yang menghasilkan pendapatan tersebut. Meskipun mekanisme ini penting untuk menjaga transparansi dan pengendalian keuangan daerah, kondisi tersebut dapat mengurangi keleluasan organisasi dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun meningkatkan kualitas layanan secara langsung.

Menurut Mahmudi (2021), sistem penganggaran sektor publik dirancang untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai prioritas pembangunan daerah. Namun, sistem tersebut juga dapat menimbulkan keterbatasan fleksibilitas pada unit pelaksana karena setiap kegiatan harus mengikuti alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan organisasi publik sering menghadapi kendala ketika harus merespons kebutuhan yang muncul secara mendadak atau melakukan inovasi layanan yang memerlukan dukungan pendanaan tambahan.

Dalam konteks Museum Sri Baduga sebagai salah satu UPTD di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam sistem keuangan daerah. Pendapatan yang berasal dari tiket masuk maupun pemanfaatan fasilitas museum menjadi bagian dari penerimaan daerah, sedangkan kebutuhan operasional museum didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disusun dan disetujui sebelumnya. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan museum tidak hanya bergantung pada besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga pada

kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di tengah keterbatasan kewenangan yang dimiliki.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam penerapan budaya organisasi berbasis kepasundanan serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan di Museum Sri Baduga. Penelitian dilaksanakan secara langsung di Museum Sri Baduga sebagai lembaga pelestarian budaya yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak pengelola museum, observasi terhadap aktivitas dan pengelolaan museum, serta dokumentasi dan studi pustaka yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen museum, dan peraturan terkait. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang berasal dari hasil wawancara pengelola museum serta data sekunder yang diperoleh dari Peraturan Daerah, dokumen resmi museum, dan berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan budaya organisasi dan kinerja keuangan. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-Nilai Kepasundanan dalam Budaya Organisasi Museum Sri Baduga

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola Museum Sri Baduga, nilai-nilai Kepasundanan terbukti hadir secara nyata dalam praktik operasional harian museum. Kehadiran nilai-nilai tersebut tidak hanya tampak dalam bentuk simbolik, melainkan telah menjadi bagian integral dari budaya organisasi yang mengarahkan pola pikir, sikap, dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugasnya. Sebagai lembaga pelestarian budaya yang memiliki fungsi edukatif, informatif, dan rekreatif, Museum Sri Baduga tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga sebagai institusi yang merepresentasikan identitas budaya Sunda kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, nilai-nilai Kepasundanan menjadi pondasi penting yang membentuk karakter organisasi dan memengaruhi cara museum menjalankan fungsi pelayanannya.

Implementasi nilai-nilai Kepasundanan dalam budaya organisasi Museum Sri Baduga menunjukkan adanya proses internalisasi budaya yang berlangsung secara berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami sebagai norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga diterjemahkan ke dalam praktik kerja sehari-hari yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks organisasi publik, penerapan nilai budaya lokal memiliki arti penting karena mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat identitas kelembagaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti *Someah*, *Singer*, dan *Bener* menjadi prinsip utama yang mewarnai berbagai aktivitas organisasi, mulai dari

pelayanan pengunjung, pengelolaan koleksi, hingga tata kelola administrasi dan keuangan museum.

Hal tersebut sejalan dengan Lase et al. (2025) yang menjelaskan bahwa budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, keyakinan, dan asumsi yang dipahami bersama oleh anggota organisasi serta menjadi pedoman dalam berpikir, berperilaku, dan menjalankan aktivitas kerja. Dengan demikian, nilai Someah, Singer, dan Bener yang diterapkan secara konsisten di Museum Sri Baduga menunjukkan bahwa budaya lokal telah terinternalisasi ke dalam budaya organisasi dan mempengaruhi perilaku kerja pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Nilai Someah (ramah dan santun) tercermin dalam cara staf menyambut pengunjung yang rata-rata mencapai 300 orang per hari, yang mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa. Staf museum memberikan pelayanan yang inklusif dan tidak membebankan biaya tambahan kepada pengunjung untuk menikmati pertunjukan seni mingguan seperti wayang golek, membatik, dan tari-tarian yang diselenggarakan sebagai agenda internal museum. Pendekatan pelayanan ini mencerminkan semangat gotong royong dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi inti dari filosofi Kepasundanan. Sikap Someah yang diterapkan oleh pegawai museum terlihat sejak pengunjung memasuki area museum hingga menyelesaikan kunjungannya. Pegawai berupaya menciptakan suasana yang nyaman dan bersahabat melalui komunikasi yang santun, penggunaan bahasa yang sopan, serta kesediaan memberikan bantuan kepada setiap pengunjung tanpa membedakan latar belakang sosial, usia, maupun tingkat pendidikan.

Lebih jauh, implementasi nilai Someah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keramahan personal, tetapi juga menjadi strategi pelayanan publik yang memperkuat hubungan antara museum dan masyarakat. Dalam berbagai kegiatan edukasi, staf museum secara aktif memberikan penjelasan mengenai koleksi yang dipamerkan, menjawab pertanyaan pengunjung, serta membantu peserta didik memahami nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam setiap koleksi. Interaksi yang humanis tersebut mencerminkan adanya orientasi pelayanan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Sikap ramah dan santun yang ditunjukkan oleh pegawai secara tidak langsung membangun citra positif museum sebagai lembaga publik yang terbuka, mudah diakses, dan mampu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, nilai Someah tidak hanya berperan dalam menciptakan kepuasan pengunjung, tetapi juga mendukung fungsi museum sebagai sarana pendidikan budaya yang efektif.

Selain itu, nilai Someah juga tercermin dalam hubungan internal antar pegawai. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antar staf berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang menjunjung tinggi rasa saling menghormati. Hubungan kerja yang harmonis tersebut menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif bagi terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik. Dalam perspektif budaya organisasi, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai Someah telah menjadi bagian dari identitas kolektif yang mempengaruhi pola interaksi sosial di lingkungan kerja. Keberadaan budaya kerja yang dilandasi sikap ramah dan santun berkontribusi terhadap terciptanya solidaritas organisasi yang kuat, sehingga setiap pegawai dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan kolaboratif.

Nilai Singer (teliti dan cermat) tampak secara jelas dalam praktik konservasi koleksi museum yang dilakukan secara rutin oleh tim khusus. Museum memiliki ribuan koleksi benda bersejarah mulai dari artefak prasejarah, prasasti, alat musik tradisional, pakaian adat, hingga perlengkapan kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Keseluruhan koleksi ini dirawat dengan menggunakan bahan-bahan tertentu yang sesuai standar konservasi guna menjaga keasliannya. Ketekunan dan ketelitian dalam merawat aset-aset tak ternilai ini mencerminkan penghayatan nilai Singer yang mendalam di kalangan staf museum. Nilai tersebut menjadi sangat penting mengingat koleksi museum merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis, ilmiah, dan edukatif yang tinggi sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk menjaga kelestariannya.

Implementasi nilai Singer terlihat dalam berbagai tahapan pengelolaan koleksi, mulai dari identifikasi, inventarisasi, dokumentasi, penyimpanan, hingga proses konservasi. Setiap koleksi dicatat secara sistematis dan didokumentasikan secara rinci guna memastikan informasi mengenai asal-usul, kondisi fisik, dan nilai sejarahnya dapat terpelihara dengan baik. Proses ini memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi karena kesalahan dalam pencatatan atau pengelolaan data dapat berdampak pada hilangnya informasi penting mengenai koleksi tersebut. Oleh karena itu, pegawai museum dituntut untuk bekerja secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan koleksi.

Nilai Singer juga tercermin dalam kegiatan pemeliharaan koleksi yang dilakukan secara berkala. Setiap benda koleksi diperiksa kondisi fisiknya untuk mendeteksi kemungkinan kerusakan akibat faktor usia, kelembaban, suhu, maupun pengaruh lingkungan lainnya. Dalam proses konservasi, staf menggunakan teknik dan bahan tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing koleksi. Ketelitian dalam menentukan metode perawatan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa upaya konservasi tidak justru menimbulkan kerusakan pada benda yang dirawat. Praktik ini menunjukkan bahwa nilai Singer tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kecermatan teknis, tetapi juga dalam tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya bagi generasi mendatang.

Lebih lanjut, penerapan nilai Singer berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan. Ketelitian dalam pengelolaan koleksi memungkinkan museum menyediakan informasi yang akurat kepada pengunjung dan peneliti. Keakuratan data tersebut menjadi salah satu indikator profesionalisme museum sebagai institusi pelestarian budaya. Dalam konteks budaya organisasi, nilai Singer membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kualitas, disiplin, dan tanggung jawab, sehingga setiap pegawai terdorong untuk melaksanakan tugasnya dengan standar kerja yang tinggi.

Sementara itu, nilai Bener (jujur dan lurus) terwujud dalam komitmen museum untuk tidak menerima kerja sama dalam bentuk uang sebagaimana diatur regulasi, serta kewajiban menyerahkan bukti pengeluaran yang sah dalam setiap penggunaan anggaran sebagai bentuk integritas terhadap sistem keuangan publik. Implementasi nilai ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dan akuntabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola organisasi museum. Temuan

tersebut sejalan dengan Allisa dan Suryaningrum (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan aspek penting dalam organisasi sektor publik karena setiap penggunaan sumber daya publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan guna mendukung kinerja organisasi. Oleh karena itu, penerapan nilai Bener dalam pengelolaan keuangan Museum Sri Baduga menunjukkan adanya upaya untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga. Sebagai lembaga publik yang menggunakan sumber daya negara dalam menjalankan kegiatannya, Museum Sri Baduga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai Bener tidak hanya tercermin dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif lainnya. Pegawai dituntut untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan prinsip integritas. Setiap penggunaan anggaran harus didukung oleh dokumen yang sah dan dapat diverifikasi sehingga proses audit maupun evaluasi dapat dilakukan secara objektif. Praktik ini menunjukkan adanya kesadaran organisasi terhadap pentingnya akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Di samping itu, nilai Bener juga tampak dalam penyampaian informasi sejarah dan budaya kepada masyarakat. Museum berupaya menyajikan informasi yang berdasarkan fakta, data, dan hasil kajian ilmiah sehingga dapat memberikan edukasi yang benar kepada pengunjung. Kejujuran dalam penyajian informasi menjadi sangat penting karena museum berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, integritas tidak hanya diterapkan dalam aspek administratif dan keuangan, tetapi juga dalam pelaksanaan fungsi edukatif museum sebagai lembaga pelestarian budaya.

Apabila dianalisis lebih mendalam, implementasi nilai Someah, Singer, dan Bener menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara budaya lokal dengan efektivitas organisasi. Ketiga nilai tersebut saling melengkapi dalam membentuk budaya kerja yang humanis, profesional, dan berintegritas. Nilai Someah memperkuat kualitas pelayanan dan hubungan sosial, nilai Singer meningkatkan kualitas pengelolaan koleksi serta profesionalisme kerja, sedangkan nilai Bener memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Kombinasi ketiga nilai tersebut menghasilkan budaya organisasi yang tidak hanya mendukung pencapaian tujuan kelembagaan, tetapi juga menjaga keberlanjutan fungsi museum sebagai pusat pelestarian budaya Sunda.

Secara keseluruhan, implementasi nilai-nilai Kepasundanan di Museum Sri Baduga menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki peran strategis dalam membentuk budaya organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Nilai Someah, Singer, dan Bener tidak hanya menjadi pedoman moral bagi pegawai, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan, pelestarian koleksi budaya, serta penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel. Temuan ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal dapat berfungsi sebagai modal sosial dan budaya yang mampu memperkuat kinerja organisasi publik. Dengan demikian, Museum Sri Baduga dapat menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai budaya Sunda diintegrasikan ke

dalam praktik organisasi modern tanpa kehilangan relevansinya dalam menghadapi tantangan pengelolaan lembaga publik di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Sistem dan Kondisi Pengelolaan Keuangan Museum Sri Baduga sebagai UPTD

Museum Sri Baduga adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mengikuti sistem pengelolaan keuangan yang terpusat sesuai dengan peraturan daerah. Semua pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket dan sewa auditorium disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam kas daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Informan menyatakan bahwa “semua pendapatan dari penjualan tiket disetorkan secara teratur, bisa setiap hari atau mingguan, langsung ke Bapenda. Tidak ada skema bagi hasil, sehingga semua dana masuk ke kas daerah” (Informan, 2026).

Pendapatan museum berasal dari penjualan tiket dan sewa auditorium. Sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023, harga tiket masuk ditetapkan senilai Rp 2.000 untuk pelajar TK hingga SMP dan Rp 3.000 untuk pengunjung yang termasuk kategori SMA, mahasiswa, dan masyarakat umum. Auditorium museum juga dapat disewa dengan biaya Rp 1.350.000 per hari. Sumber-sumber pendapatan ini menunjukkan bahwa museum tidak hanya berperan dalam melestarikan budaya dan sebagai sarana edukasi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dalam hal pengeluaran, anggaran operasional museum direncanakan melalui dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan setahun sebelumnya dan dialokasikan sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah. Penggunaan anggaran bersifat terikat sehingga setiap pos anggaran hanya dapat digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Biasanya, pengeluaran terbesar ditujukan untuk pemeliharaan bangunan dan biaya listrik. Semua pencatatan serta pelaporan keuangan dilakukan berdasarkan ketentuan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) dengan dukungan bukti pengeluaran yang valid.

Sistem manajemen keuangan ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di sektor publik. Namun, prosedur penyetoran semua pendapatan ke kas daerah membatasi fleksibilitas museum dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya secara langsung. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Museum Sri Baduga lebih difokuskan pada kepatuhan terhadap regulasi dan administrasi pemerintah daerah daripada kemandirian finansial lembaga.

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Museum Sri Baduga

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Museum Sri Baduga telah mengadopsi prinsip keterbukaan dan tanggung jawab yang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), seluruh kegiatan finansial museum dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Keterbukaan

dalam pengelolaan keuangan ditunjukkan melalui cara pengelolaan pendapatan yang berasal dari penjualan tiket dan sewa auditorium yang disetorkan secara berkala kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sistem ini memungkinkan semua pendapatan museum tercatat secara resmi dan dapat diawasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengendalian terhadap pengelolaan keuangan publik.

Di samping keterbukaan dalam hal pendapatan, tanggung jawab juga terlihat dalam penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan museum tercatat di sekretariat UPTD dan mengikuti ketentuan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Proses perencanaan anggaran dilakukan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan setahun sebelumnya sesuai dengan kebutuhan operasional museum. Setiap anggaran yang disetujui memiliki tujuan yang jelas sehingga penggunaannya harus dipatuhi sesuai dengan pos yang telah ditentukan. Sebagai contoh, anggaran untuk pemeliharaan tidak boleh dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.

Tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan juga diperkuat melalui kewajiban untuk menyerahkan bukti penggunaan anggaran pada setiap kegiatan yang dilakukan. Setiap pengeluaran harus disertai dengan dokumen yang sah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Dengan cara ini, setiap penggunaan dana bisa ditelusuri dan diverifikasi, sehingga mendukung pengelolaan keuangan yang tertib dan bisa dipertanggungjawabkan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya keterbatasan dalam fleksibilitas pengelolaan anggaran. Ketatnya aturan yang ada membuat pengelola museum tidak dapat memindahkan dana dari satu pos ke pos lain meskipun terdapat kebutuhan mendesak. Di satu pihak, situasi ini mendukung upaya pengendalian yang berkontribusi pada keterbukaan dan tanggung jawab, tetapi disisi lain dapat menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan operasional yang tiba-tiba muncul.

Dalam konteks budaya organisasi, situasi ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai kebersamaan yang ada di Museum Sri Baduga. Nilai Bageur terlihat dari tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugas dan mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan nilai Bener tampak dalam kepatuhan terhadap prosedur serta komitmen untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana melalui bukti dan laporan yang sesuai. Oleh karena itu, keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Museum Sri Baduga tidak hanya didorong oleh regulasi dan sistem birokrasi, tetapi juga diperkuat oleh nilai-nilai budaya organisasi yang mendorong perilaku kerja yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Pengaruh Budaya Organisasi Berbasis Kepasundanan terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Museum Sri Baduga sangat tertarik pada budaya Sunda karena koleksinya yang didominasi oleh sejarah dan budaya Sunda, penggunaan nama Sri Baduga sebagai simbol identitas budaya Sunda, dan partisipasi dalam berbagai aktivitas budaya, seperti wayang golek, batik, dan tari tradisional. Berbagai program tidak hanya membantu melestarikan budaya tetapi

juga mengajarkan masyarakat tentang nilai-nilai budaya Sunda. Selain itu, Museum Sri Baduga beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dengan menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri dan memberi tahu masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan minat pengunjung, terutama pelajar dan mahasiswa, yang merupakan demografi utama pengunjung museum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perpaduan antara pelestarian budaya Sunda, pelaksanaan program budaya, dan pemanfaatan media sosial memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah pengunjung museum. Kondisi tersebut terlihat dari rata-rata jumlah kunjungan yang mencapai sekitar 300 orang per hari. Dengan demikian, budaya Sunda tidak hanya berperan sebagai identitas organisasi, tetapi juga menjadi sumber daya strategis yang meningkatkan daya tarik museum sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung dan penerimaan museum.

Secara analitis, pengaruh budaya organisasi berbasis Kepasundanan terhadap kinerja keuangan Museum Sri Baduga tidak bersifat langsung pada angka-angka laporan keuangan, melainkan bekerja melalui jalur perilaku, kepatuhan, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai. Ketika museum bekerja di bawah sistem keuangan terpusat dengan sedikit otonomi, kinerja mereka tidak hanya diukur dari kemampuan mereka untuk mengelola keuangan mereka secara teratur, jujur, jelas, dan bertanggung jawab.

Budaya kepasundanan perusahaan mempengaruhi cara pengelolaan keuangan. Nilai Bener mendorong pegawai untuk melengkapi bukti pengeluaran secara benar dan sesuai ketentuan meskipun membutuhkan ketelitian lebih. Nilai Bageur tercermin dalam kerjasama antar divisi saat menyusun laporan pertanggungjawaban, yang mengurangi kelalaian administratif. Sementara itu, nilai Singer meningkatkan ketelitian dalam koleksi museum dan pencatatan aset, yang berdampak pada akurasi laporan aset daerah.

Di sisi lain, penyelenggaraan program pertunjukan seni mingguan tanpa pungutan biaya tambahan juga mencerminkan pengamalan nilai Silih Asih dan Someah dalam pelayanan kepada masyarakat. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan pendapatan dari program tersebut, kegiatan ini mampu memperkuat citra positif museum dan meningkatkan kepuasan serta minat masyarakat untuk berkunjung. Peningkatan volume kunjungan tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya penerimaan retribusi tiket secara agregat.

Dengan demikian, ada dua jalur utama yang dapat diidentifikasi yang menunjukkan bahwa budaya organisasi berbasis kepasundanan mempengaruhi kinerja keuangan Museum Sri Baduga. Pertama, meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik museum melalui pelestarian budaya dan program-program publik, yang berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung dan penerimaan retribusi daerah. Kedua, meningkatkan integritas, kepatuhan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, yang menghasilkan tata kelola keuangan yang baik. Namun, penelitian ini masih terbatas untuk mengukur seberapa besar pengaruh tersebut secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang menggunakan pendekatan campuran diperlukan untuk memeriksa dan memverifikasi hubungan yang

signifikan antara kinerja keuangan museum dan budaya organisasi berbasis kepasundan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji bagaimana budaya organisasi berbasis Pasundan diterapkan di Museum Sri Baduga, salah satu unit pemerintahan di Jawa Barat, dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Temuan dari observasi, wawancara, dan tinjauan literatur menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Sunda telah menjadi komponen kunci budaya organisasi, yang mempengaruhi perilaku karyawan dan tata kelola institusi. Nilai-nilai Pasundan seperti Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer, dan Someah, serta filosofi Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh diterapkan dalam berbagai kegiatan organisasi. Nilai Someah ditunjukkan melalui pelayanannya yang ramah kepada pengunjung, Singer melalui pengelolaan koleksi budaya yang cermat, dan Bener dan Bageur melalui sikap jujur, bertanggung jawab, dan taat aturan. Penerapan nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan keharmonisan tempat kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat peran museum sebagai penjaga budaya Sunda. Dalam pengelolaan keuangan, museum menggunakan sistem yang selaras dengan prosedur pemerintah daerah. Penjualan tiket masuk dan biaya sewa fasilitas disetorkan ke kas daerah melalui Bapenda, sedangkan penggunaan anggaran diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Meskipun sistem ini mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran, sistem ini masih kesulitan memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berbasis Pasundan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, meskipun tidak berdampak langsung terhadap angka keuangan. Pengaruh ini terlihat dari peningkatan integritas, kepatuhan, ketelitian administratif, kualitas layanan, dan efektivitas karyawan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Selain itu, program budaya dan pendidikan berbasis nilai-nilai Pasundan dapat menjadikan museum lebih menarik dan menarik lebih banyak pengunjung, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, budaya Pasundan tidak hanya berfungsi sebagai identitas organisasi tetapi juga sebagai modal sosial yang meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Secara keseluruhan, pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal Pasundan telah terbukti meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pegawai, mendorong pengelolaan keuangan yang transparan, dan memperkuat peran museum sebagai lembaga pelestarian budaya. Oleh karena itu, merangkul budaya lokal menawarkan pendekatan yang layak dan bertahan lama untuk meningkatkan kinerja sektor publik dalam menghadapi tuntutan modernisasi dan tata kelola.

DAFTAR RUJUKAN

Allisa, S., & Suryaningrum, D. (2023). Peran akuntabilitas pada pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal EMA*, 8(2), 170–181. <https://doi.org/10.51213/ema.v8i2.383>

- Aprily, N. M., Rizqi, A. M., & Purwati. (2021). Cageur bageur bener pinter singer: Filosofi pengasuhan Sunda dalam pendidikan karakter di Raudhatul Athfal (RA). *JIV: Jurnal Ilmiah Visi*, 16(1), 11–24. <https://doi.org/10.21009/JIV.1601.2>
- Dewi, R., Hanun, F., Hadiana, D., Sylvia, N., & Ramdani, Z. (2025). Silih Asah, Silih Asih, and Silih Asuh (SILAS): A decolonial conceptual framework for relational early childhood education in the Sundanese context amid global childhood discourses. *Contemporary Issues in Early Childhood*. <https://doi.org/10.1177/20436106251398516>
- Huzaeema, F. T., Nurvadi, G. M., Parameswari, L., Basyari, I. W., & Hayati, A. A. (2024). Sundanese ethnic mentifact culture Silih Asih, Silih Asuh, Silih Asah in the context of ethnopedagogy. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i1.1174>
- Indrawardana. (2012). Kearifan lokal etnik Sunda dalam menyelaraskan kehidupan dengan alam. *Jurnal Komunitas*, 4(2), 146–153.
- Kurniawan, R., & Wibowo, H. (2021). Filosofi Tri Tangtu di Bumi dalam manifestasi spasial Kampung Adat Sunda. *Jurnal Ruang Space*, 8(1), 12–25.
- Lase, D., Absah, Y., Lumbanraja, P., Giawa, Y., & Gulo, Y. (2025). Teori budaya organisasi: Konsep, model, dan implikasi untuk manajemen organisasi. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 21–45. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v3i1.128>
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik (Edisi revisi)*. UII Press.
- Maulana, M. R., Sukmayadi, Y., & Gunara, S. (2025). Silih Asah, Asih, Asuh: The concept of learner character building in music learning. *Journal of Music Science, Technology, and Industry*.
- Nasution, A. P. A., Limarwan, R. F., Nurmalasari, R., MH, C., & Hidayatullah, M. (2020). *Organisasi sektor publik*. Universitas Indo Global Mandiri.
- Nurislamingsih, R., Erwina, W., & Rohman, A. S. (2019). Pemetaan pengetahuan lokal Sunda dalam koleksi di Museum Sri Baduga. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 5(2), 109–120. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v5i2.26426>
- Purnama, J. P., & Hermanto, Y. P. (2024). Model transformasi terhadap budaya Sunda cageur, bageur, bener, pinter jeung singer. *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, 7(1), 71–85. <https://doi.org/10.53547/diegesis.v7i1.460>
- Putri, S. A., Narawati, T., & Taryana, T. (2024). Nilai Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer, dan Wanter dalam Tari Topeng Koncaran. *Ringkang: Kajian Seni Tari dan Pendidikan Seni Tari*, 4(3), 522–532. <https://doi.org/10.17509/ringkang.v4i3.77522>
- Rezqi, N., & Furqan, A. (2024). Nilai-nilai budaya Sunda Trisilas (Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh) dalam perspektif Al-Qur'an. *Indonesian Journal of Research in Islamic Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.64420/ijris.v2i2.335>
- Rochmah, E., & Rosy, B. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan publik dan fasilitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. *Publika UMA*, 10(1).

- Sampoerna University. (2022, May 12). Budaya organisasi adalah. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/budaya-organisasi-adalah/>
- Sampurno, A. H., Junani, B. L., Rambe, D. P., Pramono, R., & Purba, S. L. B. (2022). Strategi implementasi nilai-nilai budaya organisasi (Studi kasus di MIS Nurus Salam Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Syahrani, M. (2022). Akuntabilitas publik melalui budaya organisasi dan iklim etika publik dari perspektif pegawai. *Nusantara Innovation Journal*, 1(1).
- Utami, K. S. N. (2021). Representasi filosofi Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer terhadap upaya penguatan karakter peserta didik dalam pembelajaran sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 4(2), 115–122. <https://doi.org/10.17509/historia.v4i2.25952>